

ARTICLE INFORMATION

Received December 12th 2022

Accepted December 21st 2022

Published January 9th 2023

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau

Muhammad Imran

Institut Agama Islam Negeri Kendari

email: muhimran@iainkendari.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk: (1) menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan; (2) Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan; (3) Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan; (4) Untuk menguji dan menganalisis variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Baubau yang terdiri dari 23 Dinas, 5 Badan dan 1 Bagian. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling terhadap kepala bagian keuangan dan bendahara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (2) teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (3) sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (4) teknologi informasi merupakan variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to: (1) test and analyze the significance of the the regional financial accounting system influence for the quality of financial report; (2) Test and analyze the significance of the information technology utilization on the quality of financial report; (3) Test and analyze the significance of internal control system influence on the financial report quality; (4) Test and analyze the dominant variables that affect the financial report quality. This research type is a quantitative research. The population of this research is all of Regional Work Unit in Baubau City which consist of 23 Departments, 5 Agencies and 1 Division. The sampling technique is use the chief financial officer and financial manager as the samples. The data collection methods were done by questionnaire and processed by using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results showed that (1) local financial accounting system has a positive and significant impact for the financial report quality; (2) information technology has a positive and significant impact for the financial report quality; (3) internal control system has a positive and

significant impact for the financial report quality; (4) information technology is the dominant variable that affect the financial report quality.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Information Technology, Internal Control System, Financial Report Quality

PENDAHULUAN

Aset tetap merupakan salah satu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam kegiatan Instansi pemerintahan yang dihimpun adalah sekelompok orang yang berperan aktif berusaha untuk mencapai tujuan pemerintah hanya dimungkinkan karena adanya upaya pelaku yang dalam instansi tersebut. Hal ini dapat di lihat dari kinerja yang dicapai. Jika kinerja pegawai baik maka kinerja pemerintah juga baik, demikian halnya jika kinerja pemerintah yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. (Mariana, 2016).

Disadari bahwa banyak orang akan menggunakan informasi dalam laporan keuangan yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan dengan harapan laporan tersebut akan bermanfaat bagi pengguna seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami. Menurut Suwardjono (2005), informasi harus bermanfaat bagi pengguna, yang disamakan dengan informasi yang memiliki nilai kegunaan, suatu kualitas yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam kaitannya dengan keputusan, pengguna, dan keyakinan pengguna tentang informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi.

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan Negara, dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan oleh pemerintah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Pengelolaan keuangan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi sehingga pada akhirnya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sesuai criteria dan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan.

Menurut SAK (2009), laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bisnis. Laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu banyak orang dalam mengambil keputusan dengan memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja, dan perubahan posisi keuangannya, sebagaimana tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Namun, karena biasanya menggambarkan dampak keuangan dan peristiwa masa lalu dan tidak diharuskan untuk menyediakan informasi tersebut, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin diperlukan pengguna untuk membuat keputusan ekonomi.

Pemerintah melaksanakan reformasi dalam pengelolaan keuangan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan agar Gubernur, Bupati, dan Walikota menyajikan laporan keuangan kepada DPRD yang mensyaratkan format dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (APBD). APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang

standar akuntansi pemerintahan. UU No. juga dikeluarkan oleh pemerintah. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah. UU No. 33 Tahun 2004, mengubah akuntabilitas pemerintah daerah dari vertikal (ke pusat) menjadi horizontal (melalui DPRD).

Badan Pengawas Keuangan (BPK) memberikan evaluasi berupa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Ketika BPK mengeluarkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal itu menandakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah transparan, akurat, dan berkualitas. Pemeriksa memberikan empat pendapat, yaitu sebagai berikut: Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WDP), Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (TP), dan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pertanyaannya adalah pelaporan keuangan pemerintah telah sesuai persyaratan kompetensi informasi yang diatur pada peraturan perundang-undangan akan muncul ketika pelaporan keuangan dan nilai informasi dalam laporan keuangan pemerintah dibahas. Apakah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (UU No.) merupakan laporan keuangan pokok? 17 Tahun 2003 relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti? Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan yang di hasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau sehingga menghasilkan peningkatan opini dari tahun ke tahun. Alasan Peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Bau-Bau adalah karena Kota Bau-Bau merupakan salah satu daerah yang mendapatkan perubahan peningkatan opini selama 6 tahun terakhir ini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut Roviyantri (2009), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Keunggulan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kehandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, inilah yang berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penggunaan sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan berbasis kas tunggal, yang berbeda dengan penerapan sistem akuntansi pada masa sebelumnya. -masa reformasi dan sistem baru. Menurut dasar kas, pendapatan dicatat pada saat uang diterima, dan biaya dicatat pada saat uang dikeluarkan. Hal ini jelas sangat terkendala karena data yang dihasilkan hanya berupa mata uang dan mencakup data kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Akibatnya, pemerintahan Indonesia telah berubah dari akuntansi single entry menjadi double entry accounting. Entri tunggal pernah menjadi dasar pembukuan karena alasan praktis dan nyaman. Karena penggunaan double entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat diaudit, perubahan ini dianggap sebagai solusi yang mendesak untuk diadopsi seiring dengan tuntutan kuat akan penerapan tata kelola publik yang efektif (Mardiasmo: 2010).

Penggunaan teknologi informasi merupakan faktor lain yang mungkin berdampak pada standar pelaporan keuangan pemerintah. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan manusia untuk melakukan aktivitasnya. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menggantikan PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, mengatur bagaimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan teknologi informasi. Meskipun diketahui bahwa teknologi informasi memiliki berbagai keunggulan, antara lain pemrosesan transaksi yang cepat, perhitungan yang akurat, kemampuan untuk menyimpan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan multiprosesing, penerapan teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu: Devi Roviyantri (2009); Ni Made Rika Krisna, Ni Kadek Sinarwati dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014); bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari tiap variabel atribut kualitas laporan keuangan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian diatas adalah kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan segala kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Tujuan teori keagenan adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) untuk mengevaluasi lingkungan di mana keputusan harus diambil (Peran revisi keyakinan). Kedua, mengevaluasi hasil keputusan yang telah diambil guna memudahkan pembagian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (Nurillah, 2014).

Teori Kegunaan Keputusan

Teori kegunaan keputusan adalah teori yang digunakan untuk membuat standar akuntansi, khususnya Pernyataan Konsep Akuntansi Keuangan (SFAC) yang digunakan di Amerika Serikat. Teori ini juga dikenal sebagai teori akuntansi bagi investor. Selain Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB), ada juga badan yang setara, yaitu GASB. FAF menciptakan GASB pada tahun 1984 dalam hubungan "kakak-adik" dengan FASB. GASB bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk kegiatan dan transaksi pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menetapkan standar akuntansi untuk semua organisasi lain, termasuk organisasi non-pemerintah dan nirlaba.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: "Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi meliputi proses pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi". (Pasal 70: ayat 1).

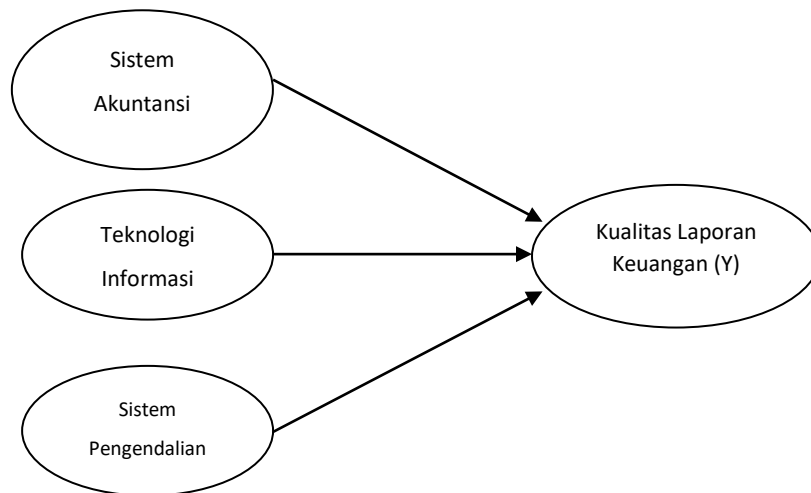
Teknologi Informasi

Halim (2001: 133) mengemukakan, teknologi informasi memiliki lima fungsi pokok yaitu mengumpulkan data, pengelolaan data, pelaporan data, penyimpanan data dan pengiriman data. Sifat sistem yang diperlukan oleh suatu organisasi sangat bergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan serta jenis-jenis keputusan yang dibuat oleh pengguna informasi, personil teknis dan spesialis, atau pegawai teknis dan administrasi.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem yang dilakukan secara menyeluruh di seluruh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mengawasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara keseluruhan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengawasi sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. Dan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah mengawasi sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem akuntansi keuangan daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik. SAKD merupakan suatu aplikasi terpadu yang dapat membantu meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan keuangan daerah yang harus dikuasai oleh staf bagian akuntansi untuk menunjang penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Ni putu yogi, I made Pradana dan Edy sujana (2014) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

H₁: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Para peneliti telah mempelajari bagaimana teknologi informasi dapat membantu organisasi sektor publik melakukan pekerjaannya dengan lebih akurat dan cepat. Mereka menemukan bahwa komputer dan jaringan dapat membantu kita memproses informasi lebih cepat dan dengan lebih sedikit kesalahan. Adanya hubungan antara teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ikhwanul Haza (2012) menunjukkan bahwa teknologi informasi

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk itu hipotesis kedua yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Nyoman, Anantawikrama dan Nyoman Ari Surya (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk itu hipotesis ketiga yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H₃: Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE

Penelitian ini dilakukan pada seluruh SKPD Kota Bau-Bau. Lokasi tersebut dipilih karena kemampuannya memberikan informasi yang jelas. tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah sekelompok benda yang memiliki sifat dan ciri tertentu. Peneliti mempelajari SKPD sebagai entitas akuntansi dan menghasilkan beberapa kesimpulan. dari 23 Dinas, 5 Badan, dan 1 Bagian sehingga jumlah populasi sebanyak 29 SKPD. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis data. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data dengan lebih dari satu variabel bebas. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan alat penelitian yang meliputi uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji F

Uji simultan dipakai dalam mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Pengujian ini memakai α 5%. Dengan standar, jika signifikansi < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujianya sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	441.758	3	147.253	18.552	.000 ^b
1	Residual	238.124	30	7.937		
	Total	679.882	33			

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan sangat kecil dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Namun, karena kemungkinan terjadinya hal ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka informasi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kualitas laporan keuangan.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tes digunakan untuk melihat seberapa besar faktor yang berbeda mempengaruhi hasil (variabel dependen). Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor tersebut berpengaruh nyata, maka disebut dengan "uji parsial". Artinya, ini hanya melihat satu bagian dari hasil, dan tidak memberi tahu kita segalanya. Tapi itu tetap berguna karena membantu kita mengetahui seberapa penting berbagai faktor itu.

Tabel 2. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-11.811	8.796		-1.343	.189
1 SistemAkuntansi	.426	.160	.350	2.658	.012
PemanfaatanTeknologiInformasi	.728	.272	.318	2.675	.012
SistemPengendalianIntern	.462	.177	.369	2.613	.014

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = -11,811 + 0,426 X_1 + 0,728 X_2 + 0,462 X_3$$

Nilai konstanta adalah -11,811 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (X_1 , X_2 dan X_3) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (Y) sebesar -11,811.

Koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah (b_1) adalah 0,426 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y mengalami kenaikan sebesar 0,426 yang disebabkan peningkatan nilai variabel X_1 , dan apabila variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel teknologi X_1 dengan variabel Y. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat.

Koefisien regresi teknologi informasi (b_2) adalah 0,728 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y mengalami kenaikan sebesar 0,728 yang disebabkan peningkatan nilai variabel X_2 , dan apabila variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel X_2 dengan variabel Y. Semakin tinggi teknologi informasi maka kualitas laporannya akan semakin meningkat.

Koefisien regresi sistem pengendalian intern (b_3) adalah 0,462 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y mengalami kenaikan sebesar 0,462 yang disebabkan peningkatan nilai variabel X_3 , dan apabila variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara X_3 dengan variabel Y. Semakin tinggi sistem pengendalian intern, maka akan membuat kualitas laporannya semakin meningkat.

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Teknologi Informasi (X_2), dan Sistem Pengendalian Intern (X_3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806 ^a	.650	.615	2.81735

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Dari tabel di atas terdapat angka R sebesar 0,806 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan ketiga variabel independennya cukup kuat, karena berada di defenisi sangat kuat yang angkanya 0,5. Sedangkan nilai R square sebesar 0,650 atau 65 % ini menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel karakteristik sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sebesar 65 % sedangkan sisanya 35 % dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) di Kota Bau-Bau membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Artinya, seperti yang diharapkan, SAKD yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik pula. Hasil pengujian menunjukkan bahwa memiliki teknologi informasi yang baik membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Artinya jika teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola laporan keuangan baik maka laporan tersebut akan berkualitas baik. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa memiliki SPI yang tinggi membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin tinggi SPI maka kualitas laporan keuangan cenderung semakin baik.

SIMPULAN

Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Baubau. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik pula.

Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Baubau. Semakin baik pemanfaatan dari sistem teknologi informasi yang digunakan maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik pula.

Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Baubau. Jika Anda memiliki sistem pengendalian internal yang cukup baik, karyawan akan cenderung bekerja secara efisien dan produktif. Hal ini akan membantu laporan keuangan perusahaan Anda menjadi akurat.

Saran

SKPD di Kota Bau-Bau harus meningkatkan efektivitas pengendalian internalnya, seperti memastikan kepala dinas (Kadis) memeriksa catatan akuntansi keuangan dan program untuk memastikan pengaturan pelaporan yang akurat, seperti salah entri dan menyajikan laporan keuangan. Dengan pengungkapan laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya akan meningkatkan keandalan laporan keuangan, dengan memperbaiki kekurangan dalam sistem pengendalian intern kemungkinan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan akan dapat diperoleh serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga ikut meningkat pada dinas Kota Bau-Bau.

Peneliti berikutnya diharapkan menguji variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan seperti kompetensi sumber daya manusia, pemahaman SAP, pengetahuan pengelolaan keuangan daerah, komitmen terhadap kemampuan SKPD dan variabel-variabel pendukung lainnya.

REFERENSI

- Andini, D. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26(1), 65-82.
- Arfianti, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Astuti, Y. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survey Pada Dinas Kota Bandung). *Skripsi*. Unikom
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi I. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Dewi, N. M. R. K., Sinarwati, N. K., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2014). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haag, S., & Keen, P. (1996). *Information Technology: Tomorrow's Advantage Today*. McGraw-Hill Companies.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Haza, I. I. (2015). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Mardiasmo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mawhinney, C. H., & Lederer, A. L. (1990). A study of personal computer utilization by managers. *Information & Management*, 18(5), 243-253.
- Megawati, L. K. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Edy Sujana, S. E. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah, 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP nomor 60 Tahun 2008.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2005. tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. *MIS quarterly*, 125-143.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.